

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen keuangan negara dilakukan dengan cara konvensional dan bertanggungjawab serta digunakannya kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara di sektor pemerintahan dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat diatur dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Republik Indonesia, 2004). Susunan tatanan keuangan BLUD tercantum dalam perundang-undangan pasal 68 yang dijelaskan pada PP No. 2 Tahun 2005 tentang norma pelaksanaan yaitu dari Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 kegiatan penataan keuangan, dan didirikanlah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada semua Puskesmas, dengan tujuan mendorong kegiatan pembangunan khususnya dalam hal tanggung jawab meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar mengelola keuangan yang fleksibel, mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas (Setiawan & Avrilianni, 2020).

BLU adalah lembaga di lingkungan pemerintahan yang dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, lembaga ini diciptakan dengan tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam menjalankan operasionalnya harus fleksibilitas dan otonomi. (Firmanto et al., 2021). Sedangkan BLU di daerah disebut BLUD, merupakan lembaga yang memiliki pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD menyatakan bahwa terdapat beberapa sumber daya manusia (SDM) dalam BLUD diantaranya pejabat pengelola (terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis) pegawai, dan pembina serta pengawas BLUD (terdiri atas pembina teknis, pembina keuangan, satuan pengawas internal, dan dewan pengawas (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan ialah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dimana yang dipercayai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes agar bertanggungjawab atas perkembangan dan pengelolaan serta kemajuan kesehatan di wilayah Bumiayu dan Paguyangan. BLUD Puskesmas Bumiayu merupakan pusat kesehatan bagi enam puskesmas meliputi: Puskesmas Bumiayu, Puskesmas Kaliwadas, Puskesmas Buaran, Puskesmas Bantarkawung, Puskesmas Bantar, dan Puskesmas Salem. Dari enam puskesmas tersebut berada dalam dalam tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan Salem. Sedangkan BLUD Puskesmas Paguyangan merupakan pusat bagi lima puskesmas meliputi: Puskesmas Paguyangan, Puskesmas Winduaji, Puskesmas Sirampog, Puskesmas Tonjong dan Puskesmas Kutamendala. Dari lima puskesmas tersebut berada dalam tiga kecamatan yaitu Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Tonjong. Kemudian pada Tahun 2015, puskesmas menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD berdasarkan surat edaran dari Bupati No. 06 Tahun 2014 yang berisi tentang Desa (Republik Indonesia, 2020).

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 50 berisi tentang struktur anggaran BLUD antara lain pertama pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama pihak lain, APBD dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah (jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD, investasi dan pengembangan usaha). Kedua belanja BLUD yang terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain) dan belanja modal (belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya). Ketiga pembiayaan BLUD terdiri dari penerimaan pembiayaan (sisa lebih perhitungan anggaran, divestasi, penerimaan utang/pinjaman) dan pengeluaran pembiayaan (investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman) (Kementerian Dalam Negeri, 2018)

Anggaran di dalam BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan, terdapat dua macam yaitu pendapatan BLUD dan Anggaran Belanja Langsung. Dalam pengelolaan anggarannya, BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) diantaranya transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) agar terciptanya kepercayaan dari masyarakat dan mengalami peningkatan kinerja (Jannah & Hermanto, 2020).

Salah satu fenomena yang terjadi terkait dengan judul penelitian ini adalah Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan tahun anggaran 2016-2021 mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuasi pada target pendapatan dan realisasi pendapatan sebagai berikut:

Table 1.1
RBA BLUD Puskesmas Bumiayu periode 2016-2021

No	Tahun	Pendapatan	
		Anggaran	Realisasi
1	2016	12.100.280.000	12.863.050.116
2	2017	13.561.244.000	13.815.143.649
3	2018	14.641.340.000	13.626.430.925
4	2019	16.625.041.000	15.905.916.278
5	2020	15.329.277.000	14.844.396.108
6	2021	14.955.696.000	14.165.922.906
	Jumlah	87.212.878.000	85.220.859.982

Sumber: Puskesmas Bumiayu, 2021

Table 1.2
RBA BLUD Puskesmas Paguyangan periode 2016-2021

No	Tahun	Pendapatan	
		Anggaran	Realisasi
1	2016	16.625.678.000	11.936.205.253
2	2017	13.082.083.000	12.442.327.098
3	2018	11.809.743.000	12.205.356.011
4	2019	12.147.164.000	13.651.972.610
5	2020	15.249.000.000	13.444.257.217
6	2021	13.765.000.000	12.718.502.670
	Jumlah	82.678.668.000	76.398.620.859

Sumber: Puskesmas Paguyangan, 2021

Rencana Bisnis Anggaran (RBA) mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuasi pada target pendapatan dan realisasi pendapatan dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain penaksiran yang dipakai dalam penyusunan RBA belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya, seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. Hal ini berarti diperlukan pemikiran untuk penyesuaian. Kemungkinan ini menghendaki agar anggaran disesuaikan secara berkesinambungan dengan kondisi yang berubah-ubah agar data dan informasi yang diperoleh akurat. Dalam penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran.

Terdapat tiga komponen yang perlu dianggarkan yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penganggaran ini didasarkan pada pagu sumber dana. Pagu merupakan batasan terbesar untuk setiap komponen yang akan dianggarkan. Untuk entitas yang menerapkan BLUD seperti puskesmas, biasanya mendapatkan pagu anggaran dari Dinas Kesehatan (Dinkes). Dinkes membantu untuk menentukan besaran pagu untuk berbagai sumber dana seperti BLUD dan APBD. Puskesmas selanjutnya menentukan proyeksi pendapatan dari pagu sumber dana tersebut. Pendapatan yang diproyeksikan adalah pendapatan BLUD yang meliputi pendapatan jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan lain-lain BLUD yang sah. Sementara untuk sumber dana APBD, pendapatan yang diproyeksikan adalah pendapatan APBD baik APBD murni maupun Bantuan Operasional Khusus (BOK) (Syncore, 2019).

Setelah pendapatan, Puskesmas perlu memproyeksikan belanja. Belanja diproyeksikan dengan batasan pagu per jenis belanja yaitu belanja pegawai, barang dan jasa (barjas), dan modal. Kemudian Puskesmas merinci belanja apa saja yang direncanakan akan dilakukan pada periode yang akan datang. Jika realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan, dan Puskesmas memanfaatkan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, maka SiLPA tersebut hanya boleh dianggarkan pada RBA perubahan, tidak boleh dianggarkan pada awal tahun. SiLPA dianggarkan sebagai penerimaan pembiayaan. Proyeksi yang telah selesai ditentukan, kemudian dicantumkan ke dalam Laporan RBA yang disajikan dalam format ringkasan, rekapitulasi, dan rincian baik secara keseluruhan maupun per pendapata, belanja, maupun pembiayaan. Penyusunan RBA menjadi lebih mudah apabila entitas yang menerapkan BLUD menggunakan software akuntansi BLUD (Syncore, 2019).

Analisis kinerja keuangan digunakan untuk membandingkan hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangannya. Analisis kinerja keuangan merupakan bagian terpenting untuk pengelolaan keuangannya dalam menilai kinerja pemerintahan untuk mengelola keuangan (Sobaruddin, 2019). Tujuan analisis laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan atau pemerintahan daerah yang berguna bagi para penggunaannya untuk membuat suatu keputusan dan mengetahui posisi laporan keuangan dengan menganalisis rasio keuangan. Rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja

keuangan pemerintah desa sebagai acuan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu pemerintah selama satu periode. Rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah memiliki fungsi, tujuan, dan maksud yang berbeda. Rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kesenjangan.

Berdasarkan penelitian Ruslana et al., (2020) membuktikan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Kabupaten Ciamis tahun 2013-2018, dengan demikian kinerja keuangan Kabupaten Ciamis dikategorikan efektif (dengan rata-rata presentase sebesar 98,61%) dalam merealisasikan capaian pendapatan daerah terhadap anggaran pendapatan yang telah disusun/direncanakan. Berbeda dengan penelitian Rosmawati & Kartikasari (2020) menyatakan bahwa rasio efektivitas berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Kabupaten Batang Hari tahun 2019, dengan demikian kinerja keuangan Kabupaten Batang Hari tahun 2019 dikategorikan tidak efektif (dengan presentase sebesar 65%) dikarenakan target pendapatan masih belum tercapai.

Penelitian Sartika (2019) menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan demikian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan efisien (dengan rata-rata presentase 72,84%) dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mampu menekan jumlah belanja daerahnya dan menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerahnya dengan baik. Berbeda dengan penelitian Arnaldi & Yusra (2020) menyatakan bahwa rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang,

dengan demikian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang dikategorikan tidak efisien (dengan rata-rata presentase 107,69%).

Penelitian Rohman et al., (2020) membuktikan bahwa rasio pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kinerja Keuangan Desa Jambu Periode 2016-2018, dengan demikian kinerja Keuangan Desa Jambu Periode 2016-2018 dikategorikan tinggi atau mengalami peningkatan (dengan rata-rata presentase sebesar 93,41%) dikarenakan meningkatnya penjualan dibidang pertanian meliputi padi/beras, sayuran (wortel, kangkung, dll), singkong, serta total pendapatan Desa Jambu tahun 2016-2018 mengalami peningkatan pada sektor hasil usaha dan pendapatan transfer pada dana desa. Berbeda dengan penelitian Susanto (2019) menyatakan bahwa rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun anggaran 2013-2015, dengan demikian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun anggaran 2013-2015 dikategorikan rendah (dengan rata-rata presentase sebesar 16,05%) dikarenakan terjadi penurunan pendapatan setiap tahun selama kurun waktu perhitungan tahun anggaran.

Penelitian Sartika (2019) membuktikan bahwa rasio keserasian berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2012-2016, dengan demikian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan baik (dengan presentase rasio belanja operasi sebesar 87,67% dan presentase rasio belanja modal sebesar 66,23%) dikarenakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Selain itu, juga dikarenakan belum ada

patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kecil atau belum terpenuhi. Berbeda dengan penelitian Maulina & Rhea (2019) menyatakan bahwa rasio keserasian berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan demikian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dikategorikan tidak baik atau belum seimbang (dengan rata-rata presentase sebesar 39,56%) dikarenakan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Tidak Langsung dibandingkan Belanja Langsung.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena *research gap* di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perlu dilakukannya penelitian tentang pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA PADA BLUD UPTD PUSKESMAS BUMIAYU DAN BLUD UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN TAHUN ANGGARAN 2016-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dapat diidentifikasi rumusan masalah berdasarkan kajian pada latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio efektivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan?

2. Apakah rasio efisiensi berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan?
3. Apakah rasio pertumbuhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan?
4. Apakah rasio keserasian berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan?
5. Apakah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh rasio efektivitas terhadap kinerja keuangan BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan
2. Pengaruh rasio efisiensi terhadap kinerja keuangan BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan
3. Pengaruh rasio pertumbuhan terhadap kinerja keuangan BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan
4. Pengaruh rasio keserasian terhadap kinerja keuangan BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan
5. Pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian terhadap kinerja keuangan BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini dapat diketahui kinerja keuangan BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi dan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bukti empiris mengenai Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada UPTD BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pedoman untuk penelitian selanjutnya agar mengkaji lebih lanjut penelitian di bidang sejenis.

3. Bagi BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, mengevaluasi kinerja pemerintah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

4. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio keuangan terhadap kinerja pada BLUD Puskesmas Bumiayu dan BLUD Puskesmas Paguyangan dalam menghasilkan dan mengelola keuangannya serta untuk mengetahui kinerja keuangannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Berisi tentang urutan pokok-pokok pikiran yang ada dalam bab-bab dan subab pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dipilih yang dijadikan landasan dalam penulisan ini. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, hubungan logis antar variable dan perumusan hipotesis serta kerangka pemikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian diuraikan mengenai variable penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan berisikan mengenai deskriptif objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Penutup terdiri dari simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran atas hasil penelitian.